

Upaya Diplomasi Pertahanan Indonesia Dengan Australia Pasca AUKUS

Glorya Alexandriana Eman¹⁾, Yedi Mulya Permana²⁾, Ni Wayan Rainy Priadarsini³⁾

^{1,2,3)} Hubungan Internasional/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Universitas Udayana.

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan terkait Upaya Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Australia Pasca AUKUS 2021. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan mengkaji data primer dari wawancara, dan data sekunder dari dokumen kebijakan, laporan atau website resmi, serta studi literatur terkait. Menggunakan teori *defence diplomacy* oleh Winger, penelitian ini menunjukkan bahwa AUKUS yang menyebabkan ketegangan di kawasan, telah mendorong Indonesia bersikap hati-hati sembari mengupayakan strategi untuk menjaga keamanan negaranya sekaligus kawasan. Indonesia memilih jalur diplomasi pertahanan, yang tercermin dalam dialog tahunan, latihan gabungan dan pertukaran personel militer, bantuan kemanusiaan, transfer teknologi, hingga penandatanganan DCA RI-Australia 2024 sebagai penguatan kerja sama pertahanan yang memungkinkan terjadinya peningkatan intensitas dan penambahan bidang kerja sama seperti *cyber* dan *space defence*. Berbagai upaya tersebut dilakukan untuk memenuhi kepentingan Indonesia terhadap Australia dalam hal transparansi kebijakan AUKUS, *trust building*, dan *capacity building* sesuai dengan tujuan diplomasi pertahanan.

Kata-kunci : Aliansi AUKUS, Australia, Diplomasi Pertahanan, *Defence Cooperation Agreement* (DCA), Indonesia

Abstract

The objective of this study is to analyze and describe Indonesia's defense diplomacy strategy toward Australia following the establishment of 2021 AUKUS alliance. This research employs a descriptive qualitative approach, drawing on primary data from interviews and secondary data from policy documents, official reports or websites, and relevant literature studies. Utilizing Winger's theory of defense diplomacy, the study finds that AUKUS, which has generated regional tensions, has prompted Indonesia to adopt a cautious stance while formulating strategies to safeguard both its national and regional security. Indonesia has chosen the path of defense diplomacy, as demonstrated through annual dialogues, joint military exercises and personnel exchanges, humanitarian assistance, technology transfers, and the signing of the 2024 Indonesia-Australia Defence Cooperation Agreement (DCA). This agreement aims to strengthen defense cooperation by enhancing engagement intensity and expanding areas of collaboration, including cyber and space defense. These various efforts reflect Indonesia's interests in promoting transparency regarding AUKUS policies, building mutual trust, and enhancing capacity objectives that align with the broader goals of defense diplomacy.

Keywords : AUKUS Alliance, Australia, Defence Diplomacy, Defence Cooperation Agreement (DCA), Indonesia

Kontak Penulis

Glorya Alexandriana Eman

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Udayana

Alamat: Jalan PB Sudirman (Kampus Sudirman) Denpasar, Bali

Telp: +62 (361) 701812 Fax: +62 (361) 701907

E-mail : alexandriana056@student.unud.ac.id

PENDAHULUAN

Pada September 2021, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia mengumumkan pakta pertahanan baru sebagai bentuk penguatan kerja sama antar ketiga negara yang dijuluki AUKUS. Aliansi tersebut difokuskan pada upaya membantu Australia memperoleh kapal selam berbasis nuklir (Carvin, S., & Juneau, T., 2023). Secara rinci, mencakup peningkatan dalam sektor-sektor seperti keamanan siber, artificial intelligent (AI), serta kemampuan dalam teknologi maritim, termasuk kapal selam (Tom Corben, 2021). Kehadiran AUKUS terlihat sebagai langkah untuk membatasi pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Tiongkok pun merespons dengan tegas, menyatakan bahwa keberadaan AUKUS dapat memicu ketidakstabilan keamanan dan perlombaan senjata di kawasan, mengingat baik Amerika Serikat maupun Tiongkok berupaya mendominasi kawasan tersebut (Dinilah A, 2024).

Selain Tiongkok, negara-negara di kawasan turut serta memberikan respons pada AUKUS, termasuk Indonesia. Indonesia merespons keikutsertaan Australia pada aliansi pertahanan AUKUS dengan sangat berhati-hati. Melalui Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, pada forum Asia Society, Indonesia menyatakan kekhawatiran bahwa aliansi ini dapat meningkatkan risiko perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan, sehingga pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas perdamaian di kawasan (CNN, 22 September 2021). Selain itu, Indonesia juga mengajukan Indonesian Paper yang bernama Nuclear Naval Propulsion (NNP) pada Konferensi Non-Proliferation Treaty (NPT) di Markas PBB pada Agustus 2022 lalu (CNN, 29 Agustus, 2022). Proposal tersebut bertujuan untuk menengahi negara-negara yang setuju dan tidak setuju akan pembentukan AUKUS. Melalui proposal tersebut, Indonesia menegaskan bahwa negaranya menyetujui pengembangan energi

nuklir sebagai energi penggerak namun tidak sebagai senjata.

Berdasarkan pada kesepakatan NPT, Australia tidak mempunyai hak untuk memiliki senjata berbasis nuklir. Penelitian oleh Mainaldi (2023) mengungkapkan bahwa transfer teknologi kapal selam nuklir AUKUS untuk Australia menggunakan uranium tingkat tinggi pada kisaran 93-97,3% yang dapat dikategorikan sebagai senjata. Sehingga dalam hal ini, Australia secara tidak langsung melanggar kesepakatan tersebut dan melahirkan suatu ancaman baru di kawasan Indo-Pasifik, termasuk bagi Indonesia. Selain itu, terdapat potensi ancaman dari kapal selam nuklir AUKUS yang melakukan patroli di perairan Indonesia.

Dalam konteks tersebut, Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk memastikan bahwa setiap inisiatif keamanan di kawasan, termasuk AUKUS, tidak mengancam stabilitas nasional maupun regional. Strategi yang dipilih Indonesia untuk mengatasi kekhawatirannya yaitu diplomasi pertahanan secara bilateral dengan Australia. Indonesia secara konsisten mendorong transparansi dan akuntabilitas atas kebijakan pertahanan kepada Australia serta menekankan pentingnya penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Dengan latar belakang ini, hubungan bilateral Indonesia-Australia menjadi krusial dalam upaya menyeimbangkan kepentingan nasional dengan dinamika geopolitik yang berkembang.

Dalam penelitian ini, dilakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya: Pertama, penelitian karya Filemon Christian Waroy yang berjudul "*Security Dilemma Indonesia Pasca Penandatanganan Pakta Keamanan AUKUS*". Menggunakan teori *security dilemma* Shiping Tang dan konsep kemitraan strategis dari Tyushka dan Czechowska, penelitian ini menyimpulkan

bahwa peningkatan kapabilitas militer Australia dalam AUKUS menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran bagi Indonesia, terutama jika tidak dikelola dengan baik karena dapat memicu reaksi serupa dari negara tetangga dan melemahkan solidaritas ASEAN. Selain itu, isu sensitif seperti Papua juga menjadi bagian dari dilema diplomatik Indonesia. Penelitian ini mendorong penerapan strategi *hedging* untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai aktor besar seperti AUKUS dan Tiongkok, guna mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas-aktif.

Penelitian kedua oleh Rage Taufika dalam tulisan berjudul "*Defence Diplomacy: Strengthening Indonesian Strategy To Adapt To The Quad, AUKUS, And Military Activities In The South China Sea*". Penelitian ini melihat kemunculan aliansi dan aktivitas militer di kawasan sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan stabilitas Indonesia karena adanya pelanggaran wilayah dan pengembangan teknologi militer canggih. Taufika merekomendasikan diplomasi pertahanan berbasis hukum sebagai respons strategis, yang diimplementasikan dalam bentuk Defence Cooperation Agreement (DCA). DCA dinilai mampu memperkuat kerja sama pertahanan secara legal dan terstruktur, sekaligus menjaga integritas wilayah serta kestabilan politik kawasan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Dedy Putra Brahmana, Anak Agung Banyu Perwita, Agus Sudarya, dan Hikmat Zakky Almubaroq dalam jurnal berjudul "Pengaruh *Defense Cooperation Agreement* Indonesia dan Singapura terhadap Lingkungan Strategis di Asia Tenggara dalam Perspektif Manajemen Pertahanan". Penelitian ini menunjukkan bahwa DCA antara Indonesia dan Singapura berhasil memperkuat kerja sama bilateral, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kapabilitas bersama dalam menghadapi potensi ancaman. Pendekatan realistis dalam pengelolaan perbedaan

kepentingan nasional memungkinkan terciptanya stabilitas kawasan dan mengurangi potensi konflik. Penelitian ini menyarankan penguatan kerja sama pertahanan dan keterlibatan lebih luas dari negara-negara Asia Tenggara untuk menjaga keamanan regional secara kolektif.

Penelitian keempat oleh Rani Mardhika, de Fretes, dan Simanjuntak yang berjudul "Kepentingan Indonesia dalam Hubungan Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Perancis (Studi Kasus: Pembelian Pesawat Tempur Dassault Rafale Tahun 2020-2022)". Penelitian ini membahas DCA RI-Perancis yang mencakup pelatihan militer, transfer teknologi, produksi industri pertahanan bersama, hingga pengadaan alutsista seperti Rafale. Penelitian ini menekankan bahwa langkah tersebut selaras dengan kebijakan Minimum Essential Force (MEF) Indonesia serta mencerminkan pendekatan non-agresif dalam peningkatan kapabilitas pertahanan udara nasional. Selain meningkatkan kepercayaan bilateral, DCA ini juga menjadi respons strategis terhadap potensi ancaman dari negara-negara dengan kekuatan militer udara canggih di kawasan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan upaya diplomasi pertahanan Indonesia dengan Australia pasca AUKUS. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dari wawancara dan sumber sekunder seperti laporan, jurnal, artikel ilmiah, situs resmi pemerintahan dan lainnya. Negara merupakan unit analisis dalam penelitian ini dan teknik studi dokumentasi digunakan untuk menyortir kebutuhan analisis diplomasi pertahanan Indonesia dengan Australia pasca AUKUS. Untuk teknik analisis data diterapkan tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi.

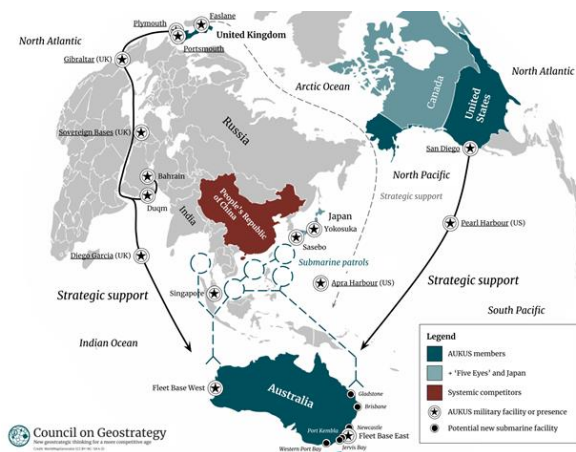
HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Pembentukan AUKUS

Pada September 2021, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia mengumumkan pakta pertahanan baru sebagai bentuk penguatan kerja sama antar ketiga negara yang sudah terjalin lama. Aliansi tersebut dijuluki AUKUS, yang difokuskan pada upaya membantu Australia memperoleh kapal selam berbasis nuklir (Carvin, S., & Juneau, T., 2023). Ide pembentukan AUKUS berfokus pada penguatan kerja sama pertahanan yang sejalan dengan kemajuan teknologi dan ketersediaan sumber daya. Secara rinci, hal ini mencakup peningkatan dalam sektor-sektor penting seperti keamanan siber, kecerdasan buatan (AI), serta kemampuan dalam teknologi maritim, termasuk kapal selam (Tom Corben, 2021).

Dalam konteks ini, Australia berupaya untuk mengembangkan kapasitas militer jangkauan jauh terutama di sektor angkatan laut melalui akuisisi kapal selam SSN, guna mengimplementasikan pendekatan pertahanan global sebagaimana yang digariskan dalam dokumen Strategi Pertahanan Australia (DSR), yang bertujuan untuk menghalangi potensi lawan dalam mencapai tujuannya melalui penggunaan kekuatan atau ancaman penggunaan kekuatan untuk mendominasi negara-negara lain.

Gambar 1. *The Geopolitic Of AUKUS*



Sumber: (Council Of Geostrategy, 2006)

Kehadiran AUKUS terlihat sebagai langkah untuk membatasi pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Tiongkok pun merespons dengan tegas, menyatakan bahwa

keberadaan AUKUS dapat memicu ketidakstabilan keamanan dan perlombaan senjata di kawasan Indo-Pasifik, mengingat baik Amerika Serikat maupun Tiongkok berupaya mendominasi kawasan tersebut (Dinilah A, 2024). Adapun respon negara-negara lain seperti Malaysia bersikap hati-hati, Jepang dan Filipina mendukung, sementara Singapura, Korea Selatan, dan India mengambil posisi netral atau penuh pertimbangan. Secara keseluruhan, AUKUS menjadi faktor baru yang mendorong peninjauan ulang kebijakan pertahanan dan posisi geopolitik di kawasan.

Respon dan Posisi Indonesia Terhadap AUKUS

Indonesia merespons pembentukan AUKUS dan keterlibatan Australia dengan sangat hati-hati, mengungkapkan keprihatinan atas potensi perlombaan senjata, pelemahan rezim Non-Proliferasi Nuklir (NPT), dan risiko ketidakstabilan di Indo-Pasifik. Indonesia menekankan pentingnya transparansi, dialog, dan penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya UNCLOS. Selain itu, Indonesia mengajukan *Nuclear Naval Propulsion (NNP) Paper* dalam Konferensi NPT 2022 untuk menengahi perbedaan pandangan antarnegara, sekaligus menegaskan dukungan terhadap penggunaan nuklir untuk energi, bukan sebagai senjata.

Kehadiran kapal selam nuklir AUKUS menimbulkan kekhawatiran di Indonesia, termasuk dari politisi dan akademisi, yang menganggapnya berpotensi mengganggu stabilitas kawasan dan mengancam kedaulatan nasional. Wacana penutupan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) muncul, namun terbentur aturan UNCLOS yang menjamin hak pelayaran internasional. Di tengah keterbatasan alat pendeteksi kapal selam, Indonesia menyadari pentingnya memperkuat angkatan laut untuk menjaga kedaulatan, mengamankan

kepentingan strategis, dan menanggapi dinamika kekuatan militer regional. Posisi geografis Indonesia yang strategis sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan banyak negara membuat isu AUKUS sangat relevan dalam perumusan kebijakan pertahanan dan keamanan nasional.

Diplomasi Pertahanan Indonesia-Australia Setelah AUKUS

Indonesia dan Australia memiliki sejarah panjang kerja sama pertahanan sejak awal kemerdekaan Indonesia, didorong oleh kedekatan geografis dan kepentingan strategis kawasan. Meskipun hubungan bilateral sempat mengalami pasang surut, terutama akibat isu Timor Leste pada 1999, kedua negara terus membangun kembali kepercayaan melalui dialog strategis. Tonggak penting kerja sama ini adalah penandatanganan Traktat Lombok pada 2006, yang memperkuat kemitraan resmi di bidang pertahanan dan keamanan, sekaligus menandai pemulihan hubungan pasca-krisis.

Pasca AUKUS, Indonesia menjalankan langkah diplomasi pertahanan yang strategis dengan Australia guna mengelola kekhawatiran dan menjaga stabilitas kawasan. Langkah ini mencerminkan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif tidak memihak kekuatan besar mana pun, namun tetap berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan keamanan regional. Pemerintah Indonesia menilai bahwa kehadiran kapal selam bertenaga nuklir di kawasan Indo-Pasifik dapat meningkatkan risiko perlombaan senjata dan ketegangan strategis, terutama di tengah rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Oleh karena itu, Indonesia melakukan upaya diplomasi pertahanan untuk memastikan bahwa pengembangan kapabilitas militer tidak mengganggu stabilitas kawasan.

Upaya tersebut diimplementasikan dalam berbagai bentuk kerja sama yaitu:

1. Forum Dialog Bilateral Tahunan *Indonesia Australia Defence Strategic Dialogue* (IADSD)

Gambar 2. *Indonesia-Australia Defence Strategic Dialogue 2024*



Sumber: (Kemenhan RI, 2024).

Forum IADSD merupakan forum dialog tahunan antara Indonesia dan Australia yang membahas isu pertahanan, keamanan, dan politik luar negeri, dengan keamanan maritim sebagai salah satu fokus utama. Forum ini menjadi wadah efektif dalam membangun kerja sama maritim, seperti patroli terkoordinasi, latihan bersama, pertukaran informasi, serta pendidikan dan pelatihan. Kerja sama ini mendukung ketahanan nasional melalui peningkatan kepercayaan, kapasitas, dan citra positif negara.

Dalam forum IADSD ke-20 pada Oktober 2024, kedua negara juga menekankan pentingnya kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan, industri pertahanan, dan kesehatan militer. Indonesia secara konsisten menyuarakan pentingnya transparansi AUKUS dan kepatuhan terhadap prinsip nonproliferasi nuklir sesuai NPT dan IAEA Safeguards, mengingat keterlibatan Australia dalam AUKUS yang menimbulkan kekhawatiran di kawasan.

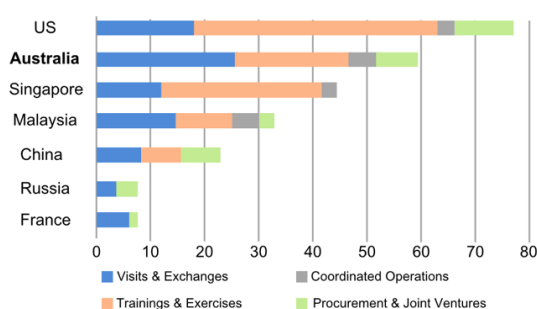
2. Latihan Gabungan Bersama : Latgabma Keris Woomera 2024

Merupakan latihan militer bilateral terbesar antara TNI dan Australian Defence Force (ADF) yang digelar di Jawa Timur pada November 2024. Latihan ini bertujuan meningkatkan interoperabilitas, memperkuat hubungan bilateral, serta menguji kemampuan operasi amfibi, serangan udara, dan penembakan amunisi tajam. Kegiatan utama meliputi pendaratan amfibi, latihan penembakan terpadu, dan integrasi pasukan di kapal HMAS Adelaide. Latihan ini mencerminkan komitmen Indonesia-Australia dalam menjaga stabilitas Indo-Pasifik dan menjadi sarana diplomasi pertahanan non-konfrontatif. Kerja sama ini memperkuat kapabilitas militer, kepercayaan antar negara, dan peran strategis Indonesia di kawasan.

3. Kerja Sama Pendidikan Militer

Kerja sama pelatihan militer antara Indonesia dan Australia telah dikembangkan sejak 2021, melalui program-program ADF untuk personel TNI seperti MELT, PIAELC, ROEW, dan SIWA (buku laporan atase pertahanan, 2024). Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, kepemimpinan, pemahaman hukum konflik, dan strategi pertahanan, sekaligus memperkuat hubungan bilateral dan modernisasi militer Indonesia.

Gambar 3. Jumlah Program Pengiriman Personel Militer ke Luar Negeri



Sumber: (Data Dik LN Athandikzin Kemenhan, diolah)

Australia berada pada peringkat ke-2 terbanyak dalam kerja sama pendidikan dan pelatihan bagi personel TNI. Kerja sama tersebut memberikan manfaat besar dalam modernisasi TNI. Program-program pendidikan di Australia dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis, taktik, manajemen sumber daya, dan kemampuan bahasa Inggris personel TNI. Pengalaman internasional yang diperoleh juga memperluas wawasan serta membangun jaringan dengan militer negara lain. Selain meningkatkan kualitas individu, kerja sama ini memperkuat kemitraan bilateral dan mendukung diplomasi pertahanan Indonesia yang mengedepankan pendekatan soft power dan stabilitas regional.

4. Bantuan Kemanusiaan

Pada bidang bantuan kemanusiaan, TNI menunjukkan komitmen nyata melalui keterlibatan dalam penanganan kebakaran hutan di New South Wales pada 2025, dengan mengirimkan personel dan sumber daya untuk membantu Australia. Langkah ini memperkuat kepercayaan dan hubungan antar kedua negara serta menegaskan peran TNI sebagai kekuatan yang tidak hanya fokus pada pertahanan teritorial tetapi juga siap berkontribusi dalam misi kemanusiaan regional.

5. Industri Pertahanan

Pada aspek transfer teknologi dan industri pertahanan, Australia telah memberikan hibah kendaraan lapis baja Bushmaster beserta pelatihan operasional yang komprehensif untuk personel TNI. Kerja sama ini meliputi pelatihan teknis, pemeliharaan kendaraan, serta dukungan teknologi komunikasi dan pengawasan maritim modern. Meskipun kerja sama produksi bersama dan lisensi manufaktur masih terbatas, kegiatan ini telah meningkatkan kapasitas teknis dan profesionalisme pertahanan Indonesia. Peluang pengembangan kerja sama di bidang industri pertahanan tetap

terbuka, sejalan dengan kebutuhan Indonesia akan teknologi canggih dan komitmen Australia dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

6. *Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Australia (Treaty-Level)*

Gambar 4. *Signing Of DCA RI-Australia*



Sumber: (CNN Indonesia, 2024)

Pada Agustus 2024, DCA RI-Australia ditandatangani oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo dan Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, memperkuat kerja sama pertahanan kedua negara (Kemhan RI, 2024). Perjanjian ini mencakup dialog kebijakan, intelijen, industri pertahanan, pendidikan, keamanan maritim, bantuan kemanusiaan, logistik militer, penanggulangan terorisme, pemeliharaan perdamaian, serta tata kelola pemerintahan (Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan, wawancara, 24 Oktober 2024).

Richard Marles menyebut DCA sebagai perjanjian paling signifikan dalam sejarah kerja sama pertahanan RI-Australia, menegaskan komitmen memperkuat kemitraan dalam tatanan global berbasis aturan (Australia MOD, 2024). Menteri Pertahanan Prabowo menegaskan DCA bukan pakta aliansi militer, melainkan langkah bersama menghadapi ancaman keamanan dan menjaga perdamaian kawasan (Kompas, 2024). Brigjen Edwin Adrian Sumantha menambahkan DCA adalah perjanjian hukum mengikat.

Secara hukum internasional, DCA menjadi payung hukum tertinggi kerja sama pertahanan yang harus diratifikasi, menjamin perlindungan

personel dan alutsista di luar negeri. Ikhwan Solihan menyatakan DCA penting untuk ketertiban administrasi dan memberikan dasar hukum bagi kebijakan serta operasi di luar negeri (wawancara, 3 Maret 2025).

DCA memberikan dasar kuat bagi Indonesia dan Australia untuk mempererat kerja sama pertahanan yang saling menguntungkan, dengan beberapa aspek utama:

a. Peningkatan Kapasitas Militer dan Interoperabilitas. Hal ini mendorong latihan bersama, pertukaran personel, dan kolaborasi teknologi militer guna memperkuat kemampuan TNI, termasuk keamanan siber dan maritim.

b. Kontribusi terhadap Stabilitas Indo-Pasifik. DCA menjadi wadah dialog untuk menjaga perdamaian kawasan, terutama terkait dinamika AUKUS dan ketegangan di Laut China Selatan.

c. Kolaborasi Penanggulangan Ancaman Non-Tradisional. Hal ini memperkuat kerja sama dalam menghadapi terorisme, penyelundupan, kejahatan lintas batas, dan bencana alam demi keamanan wilayah dan jalur perdagangan maritim.

d. Peningkatan Kapasitas Personel Militer. Program pendidikan dan pelatihan bersama diharapkan meningkatkan kualitas personel dan lembaga militer, mencetak perwira TNI yang kompeten menghadapi tantangan modern dan misi perdamaian.

e. Peluang Diplomasi Pertahanan. DCA sebagai platform untuk memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia secara bebas-aktif, mendukung tatanan kawasan yang damai dan stabil (Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan, wawancara 5 Februari 2025).

Proses perumusan DCA melibatkan kerja sama lintas sektor, termasuk Kemhan, Kemlu,

TNI, diplomat senior, dan ahli hukum internasional. Kemhan dan TNI menyusun kebutuhan teknis dan strategis, Kemlu menangani diplomasi dan hukum internasional, Kemenkumham memastikan kesesuaian dengan hukum nasional, presiden memberi legitimasi tertinggi, dan DPR meratifikasi perjanjian.

Analisis Diplomasi Pertahanan Indonesia-Australia Melalui Teori *Defence Diplomacy*

Gregory Winger dalam *The Theory of Defence Diplomacy* menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan adalah penggunaan militer tanpa kekerasan, seperti pertukaran perwira atau latihan bersama, untuk mencapai kepentingan internasional. Andre Cottey dan Anthony Foster menambahkan bahwa diplomasi ini dilakukan di masa damai sebagai alat kebijakan keamanan dan hubungan luar negeri. Di Indonesia, kegiatan ini umumnya melibatkan TNI atau Kementerian Pertahanan.

Sesuai dengan teori Diplomasi Pertahanan menurut (Syawfi, 2009):

- (1) Diplomasi pertahanan untuk langkah-langkah membangun kepercayaan,
- (2) Diplomasi pertahanan untuk peningkatan kemampuan pertahanan, dan
- (3) Diplomasi pertahanan untuk pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

Pertama, diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Australia memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan (*trust building*), khususnya dalam menghadapi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Bagi Indonesia, kemitraan ini penting untuk memperoleh akses terhadap informasi sensitif dan sistem *security clearance* yang diperlukan dalam kerja sama militer tingkat lanjut, termasuk interoperabilitas, pertukaran intelijen, dan pelatihan strategis. Sehingga, Indonesia berkepentingan menggunakan jalur diplomasi

pertahanan dengan Australia untuk meminimalkan ketegangan, meningkatkan mutual understanding, dan membangun komunikasi militer yang terbuka guna menghindari miscalculation atau salah tafsir niat strategis.

Kedua, Indonesia berkepentingan dalam hal transparansi kebijakan pertahanan. Melihat kebijakan pertahanan Australia yang semakin aktif dengan bergabung pada aliansi AUKUS, Indonesia menekankan transparansi akan tindakan Australia kedepannya. Terlebih, mengenai jalur patroli dari kapal selam nuklir Australia yang harus selalu diawasi agar tidak mengganggu perairan Indonesia. Selain itu, DCA memberikan jaminan hukum yang kuat mengenai keselamatan personel dan keamanan maritim apabila terjadi insiden yang tidak diinginkan, seperti kebocoran nuklir di perairan Indonesia.

Ketiga, Indonesia memiliki kepentingan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan (*capacity building*) dan modernisasi alutsista agar dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks, baik di dalam negeri maupun di tingkat regional. Australia, dengan kemajuan teknologi dan pelatihan militer yang mumpuni, dapat memberikan akses kepada Indonesia untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan teknik baru dalam hal taktik, strategi, dan penggunaan peralatan militer modern. Pelatihan bersama yang dilakukan melalui program bilateral seperti latihan bersama (*joint exercises*) dan pertukaran pengalaman dapat membantu meningkatkan profesionalisme personel militer Indonesia. DCA akan memungkinkan terjadinya program pertukaran pendidikan, latihan bersama, dan diskusi yang lebih masif.

Dalam diplomasi pertahanan pasca AUKUS, Indonesia menggunakan instrumen militer non-koersif untuk menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat rezim non-proliferasi nuklir. Diplomasi ini berfungsi sebagai strategi

confidence-building untuk mengurangi miskonsepsi dan membangun transparansi, sesuai prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Indonesia menghindari *bandwagoning* dengan AUKUS, memilih *strategic hedging* untuk menjaga hubungan baik dengan Australia sambil mengawasi potensi destabilisasi teknologi nuklir. Diplomasi ini juga mendorong akuntabilitas Australia dalam kerangka Non-Proliferation Treaty (NPT) dan mencegah perlombaan senjata di Indo-Pasifik.

Adapun sebagai negara sentral di ASEAN, Indonesia memastikan dinamika geopolitik baru tidak mengganggu sentralitas ASEAN dan kerja sama keamanan regional berbasis konsensus. Pendekatan ini menjaga relevansi forum multilateral seperti ADMM+, ARF, dan EAS, sekaligus mencegah polaritas akibat aliansi eksklusif seperti AUKUS yang kurang transparan. Indonesia menekankan pentingnya transparansi, penghormatan hukum internasional, dan dukungan rezim non-proliferasi seperti NPT dan SEANWFZ, memperkuat perannya sebagai norm entrepreneur yang mendorong tatanan keamanan regional damai, stabil, dan berbasis aturan.

PENUTUP

Dari penjelasan yang ada dapat disimpulkan bahwa, adanya aliansi pertahanan AUKUS telah menimbulkan ketegangan di kawasan. Hal ini mendorong negara Indonesia mengupayakan strategi terbaiknya agar tetap dapat menjaga keamanan dan keutuhan wilayah, serta stabilitas kawasan. Pada awalnya, Indonesia merespon kehadiran AUKUS dengan meluncurkan beberapa kritikan yang secara tidak langsung ditujukan pada Australia untuk mengedepankan Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) dan Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) yang akan memicu perlombaan senjata (*race of arms*) di kawasan. Selain itu, terdapat potensi ancaman

dari kapal selam nuklir AUKUS yang melakukan patroli di perairan Indonesia.

Kemudian, sejalan dengan prinsip non-blok dan bebas aktif, Indonesia mengubah ancaman tersebut menjadi peluang. Dengan sikap berhati-hati, Indonesia memilih jalur diplomasi pertahanan dengan Australia, ditunjukkan dengan adanya penguatan kerja sama pertahanan DCA RI-Australia tahun 2024. Hal ini meliputi dialog kebijakan pertahanan, pertukaran pendidikan bagi personel militer, latihan gabungan bersama, transfer pengetahuan dan industri pertahanan, serta ada kemungkinan bidang tambahan dalam DCA ini yaitu *cyber and space defence*, (wawancara Kasubdit Amerika dan Pasifik, Ditkersinhan Ditjen Strahan Kemhan, Ikhwan Solihan, 3 Maret 2025).

Berbagai bentuk diplomasi pertahanan tersebut mengedepankan transparansi, peningkatan kepercayaan dan kapabilitas pertahanan, dalam hal ini bagi Indonesia, dikarenakan Indonesia mengakui bahwa Australia memiliki kapabilitas yang lebih unggul (wawancara Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan, 5 Februari 2025). Pada akhirnya, sesuai dengan teori diplomasi pertahanan menurut Syawfi, Diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Australia memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan dan mengelola dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Indonesia memanfaatkan kerja sama ini untuk memperoleh akses informasi sensitif, meningkatkan interoperabilitas militer, serta mencegah miscalculation melalui komunikasi terbuka.

Selain itu, Indonesia menekankan pentingnya transparansi kebijakan pertahanan Australia, khususnya terkait AUKUS dan pergerakan kapal selam nuklir yang berpotensi melintasi wilayah Indonesia. Kerja sama dalam

kerangka Defence Cooperation Agreement (DCA) juga memberikan jaminan hukum atas keselamatan personel dan keamanan maritim jika terjadi insiden. Terakhir, Indonesia melihat DCA sebagai peluang untuk meningkatkan kapasitas pertahanan dan modernisasi alutsista melalui pelatihan bersama, pertukaran pengalaman, serta akses terhadap teknologi dan strategi militer Australia.

Adapun saran yaitu pertama, pemerintah perlu mengoptimalkan DCA sebagai kerangka utama untuk memperluas kerja sama di bidang keamanan siber, intelijen, luar angkasa, dan pertahanan non-konvensional. Kedua, hubungan dengan Australia harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas pertahanan nasional lewat transfer teknologi dan modernisasi alutsista, khususnya kapal patroli dan sistem deteksi bawah laut di wilayah strategis seperti Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. Terakhir, pelibatan parlemen, akademisi, dan masyarakat sipil penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas kerja sama pertahanan sesuai hukum nasional dan prinsip non-proliferasi nuklir.

Penelitian selanjutnya sebaiknya mengkaji dampak diplomasi pertahanan Indonesia-Australia pasca AUKUS terhadap dinamika kekuatan di Indo-Pasifik dan peran ASEAN dalam menjaga stabilitas regional. Studi tentang efektivitas implementasi DCA dalam peningkatan kapasitas militer juga penting. Selain itu, analisis persepsi masyarakat dan elit politik Indonesia terhadap kerja sama ini dapat memperkuat legitimasi diplomasi pertahanan. Terakhir, riset tentang risiko konflik dan mekanisme pengelolaannya perlu dilakukan untuk mencegah eskalasi ketegangan di kawasan.

Daftar Pustaka

- Anggrainy, Frida. (2024). "Prabowo Teken Kerja Sama Pertahanan RI-Australia, Jaga Keamanan Asia Pasifik". Diakses 31 Januari 2025 dari Detiknews.com <https://news.detik.com/berita/d-7516172/prabowo-teken-kerja-sama-pertahanan-ri-australia-jaga-keamanan-asia-pasifik>
- Arikunto, Suharsimi. 2009. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Australia Defence Ministers. (29 Agustus, 2024). "Australia-Indonesia Defence Cooperation Agreement signed". Diakses pada 27 September 2024 pada <https://www.minister.defence.gov.au/media-releases/2024-08-29/australia-indonesia-defence-cooperation-agreement-signed#:~:text=The%20treaty%2Dlevel%20agreement%20will,well%20as%20across%20defence%20industry>
- Basri, H. (2014). Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda. *Journal of US-China Public Administration*, Vol.11, No.10, 831-838. DOI: 10.17265/1548-6591/2014.10.003
- Brahmana, D. P., Perwita, A. A. B., Sudarya, A., & Almubaroq, H. Z. (2023). Pengaruh Defense Cooperation Agreement Indonesia Dan Singapura Terhadap Lingkungan Strategis Di Asia Tenggara Dalam Perspektif Manajemen Pertahanan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(7), 3585-3596.
- Carvin, S., & Juneau, T. (2023). Why AUKUS and not CAUKUS? It's a Potluck, not a Party. *International Journal*, 78(3), 359-374
- CNN Indonesia. (22 September, 2021). Menlu Retno Khawatir Lomba Senjata di Indo-Pasifik. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/2021/0922162000-106-697967/menlu-retno-khawatir-lomba-senjata-di-indo-pasifik/amp>
- CNN Indonesia. (29 Agustus, 2022). Indonesia Bawa Isu Kapal Selam Bertenaga Nuklir ke Rapat di Markas PBB. CNN Indonesia . <https://www.cnnindonesia.com/internasional/2022/0828172034-106-840095/indonesia-bawa-isu-kapal-selam-bertenaga-nuklir-ke-rapat-di-markas-pbb>
- Department of Foreign Affairs and Trade. (2018). Joint Declaration on a Comprehensive Strategic Partnership between Australia and the Republic of indonesia. Dipetik Januari 31, 2025, dari Department of Foreign Affairs and Trade: <https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/joint->

- [declaration-comprehensive-strategic-partnership-between-the-commonwealth-of-australia-and-republic-of-indonesia](#)
- Departemen Pertahanan Australia. (2020, Juli 1). 2020 Defence Strategic Update. <https://www.defence.gov.au/StrategicUpdate2020/>
- Departemen Pertahanan Australia. (2023, Juni 21). Pelatihan Bushmaster memperkuat hubungan [Bushmaster training reinforces ties]. <https://www.defence.gov.au/news-events/news/2023-06-21/bushmaster-training-reinforces-ties>
- Dugis, V. M. (2015). Memperkokoh Hubungan Indonesia-Australia. *Global & Strategis*, 9(2), 309-324. doi:10.20473/jgs.9.2.2015.309-324
- Gregory Winger, "The Velvet Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy". IWM Junior Visiting Fellows' Conferences, Vienna, 2014. 5.
- Ihsanuddin. (29 Agustus, 2024). "Teken Perjanjian dengan Prabowo, Wakil PM Australia: Ini Perjanjian Pertahanan Paling Signifikan". KOMPAS.com. Diakses 27 September 2024 pada <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/29/18123411/teken-perjanjian-dengan-prabowo-wakil-pm-australia-ini-perjanjian-pertahanan>
- Jada Fraser, J. K. (2022). AUKUS Briefing Book . PLuSAlliance.org.
- Kedubes Australia. (2024). Pernyataan Bersama Tingkat Menteri mengenai Kerja Sama Pertahanan Australia-Indonesia. Diakses 31 Januari 2025 pada https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/S_M24_074.html
- Kedutaan Besar Australia di Indonesia. (2024, November 16). Latihan militer Australia-Indonesia Keris Woomera berakhir di Jawa Timur. [https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/S_M24_109.html#:~:text=16%20November%202024,\(TNI\)%20di%20Jawa%20Timur](https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/S_M24_109.html#:~:text=16%20November%202024,(TNI)%20di%20Jawa%20Timur)
- Kemhan RI, 2024. "Menhan Prabowo Tanda Tangan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan RI-Australia di Akmil Magelang" diakses 25 September 2024 pada <https://www.kemhan.go.id/2024/08/29/menhan-prabowo-tanda-tangani-perjanjian-kerja-sama-pertahanan-ri-australia-di-akmil-magelang.html>
- Kinne, B. J. (2018). Defense cooperation agreements and the emergence of a global security network. *International Organization*, 72(4), 799-837. <https://doi.org/10.1017/S0020818318000218>
- Mainaldi, B. (2023). Non-Proliferasi: Problematika Hukum Penggunaan Tenaga Nuklir pada Kapal Selam Militer. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 4(1), 93-118.
- Mangindaan, R. (2013, September). Meningkatkan Peran Diplomasi Pertahanan: Perspektif. Diakses 1 November 2024 melalui Forum Kajian Pertahanan Maritim: <http://www.fkpmaritim.org/>
- Mardhika, R., de Fretes, C. H. J., & Simanjuntak, T. R. (2023). Kepentingan Indonesia dalam Hubungan Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Perancis:(Studi Kasus: Pembelian Pesawat Tempur Dassault Rafale Tahun 2020-2022). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(04), 43-55.
- Marison, W. (2024, Agustus 29). Pengamat: DCA Indonesia-Australia perkuat TNI di mata internasional. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/4294947/pengamat-dca-indonesia-australia-perkuat-tni-di-mata-internasional>
- Moleong, J. (2007 : 26). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Rosdakarya.
- Nur Aivanni, 2021. "Menlu RI Soroti Masalah AUKUS dalam Pertemuan dengan Asia Society". Diakses 8 September 2024 melalui <https://mediaindonesia.com/internasional/434512/menlu-ri-soroti-masalah-aukus-dalam-pertemuan-dengan-asia-society>
- Prakoso, L. Y. (2021). AUKUS Peluang dan Kendala bagi Indonesia. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 9(3), 215-222.
- Sakti, T. R. (2016). Kerjasama Keamanan: Studi Kasus Traktat Lombok Antara Indonesia dan Australia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(1), 99-114. Diambil kembali dari <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jhi3ad9720910full.pdf>
- Saputra, A. A. (2024, September 9). Sejarah baru kerja sama pertahanan Indonesia-Australia. *Sindo News*. <https://nasional.sindonews.com/read/1451715/16/sejarah-baru-kerja-sama-pertahanan-indonesia-australia-1725804543>
- Sugiyono. 2012. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukadis, B. (2018). Peran Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Kerjasama Pertahanan Indonesia Dan Amerika Serikat. *MANDALA: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 1(1), 92-123.

- Supriyatno. Makmur. 2014. Tentang Ilmu Pertahanan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- T. Hermawan and R. Sutanto, "STRATEGI PERTAHANAN LAUT INDONESIA DALAM ANALISA ANCAMAN DAN KEKUATAN LAUT", JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT, vol. 10, no. 2, pp. 363-371, May 2022.
- Taufika, R. DEFENCE DIPLOMACY: STRENGTHENING INDONESIAN STRATEGY TO ADAPT TO THE QUAD, AUKUS AND MILITARY ACTIVITIES IN THE SOUTH CHINA SEA.
- The Courier-Mail. (2024, November 15). Townsville forces among the 2,000 personnel participating in Exercise Keris Woomera. https://www.couriermail.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=CMWEB_WRE170_a&dest=https%3A%2F%2Fwww.couriermail.com.au%2Fnews%2Ftownsville%2Ftownsville-forces-among-the-2000-personnel-participating-in-exercise-keris-woomera%2Fnews-story%2Fb3c1e8d830958cdabeaac5b283b715dd&mempty=anonymous&mode=premium&v21=GRO_UA-Segment-2-NOSCORE
- Tom Corben, "What is the AUKUS Partnership?" 16 September 2021, diakses pada tanggal 12 Juni 2023 dari <https://www.ussc.edu.au/analysis/explainer-what-is-the-aukus-partnership>
- Vojetta, H., & Ashar, A. R. (2023, May 10). How AUKUS nuclear submarine pact affects Indonesia. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/05/10/how-aukus-nuclear-submarine-pact-affects-indonesia.html>
- Witarti, D. I., & Armandha, S. T. (2015). Tinjauan Teoretis Konsepsi Pertahanan dan Keamanan Di Era Globalisasi Industri Pertahanan. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, 5(3), 87-106.